

## **ABSTRAK**

### **RELEVANSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI DALAM KEADAAN NEGARA BERSTATUS DARURAT COVID-19 DALAM PERSPEKTIF**

#### **KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA**

**Oleh**

**GURUH SYAHPUTRA**

Isu penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi kembali muncul ke permukaan setelah terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara atas dana bantuan sosial Covid-19. Firli Bahuri selaku Ketua KPK, mengatakan dirinya akan menuntut pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19) dengan hukuman mati. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah pengaturan pidana mati dalam perspektif hukum pidana di Indonesia? Bagaimana syarat dan kualifikasi delik korupsi dalam keadaan negara berstatus darurat covid-19 yang dapat diterapkan sanksi pidana mati? Bagaimana relevansi penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan negara berstatus darurat covid-19?

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan sifat penelitian bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual. Data penelitian terdiri bersumber dari data primer dan sekunder. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif.

Kesimpulan, pidana mati dalam perspektif hukum pidana tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi menjaga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat. Syarat penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu harus terpenuhinya ketentuan Pasal 2 Ayat (1), juga unsur dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK. Pidana mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam, cukup pantas dan layak diterapkan.

Saran, perlu mempertahankan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Perlu untuk melakukan revisi terhadap Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK dengan mengatur kriteria yang jelas dan tegas terhadap penerapan pidana mati. Perlu untuk menerapkan pidana mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam.

Kata Kunci : *Hukuman Mati, Pelaku Korupsi, Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

## **ABSTRACT**

**THE RELEVANCE OF THE DEATH PENALTY FOR CORRUPTION  
PERFORMERS IN COUNTRIES WITH COVID-19 EMERGENCY STATUS IN  
THE PERSPECTIVE OF THE BOOK  
OF LAW CRIMINAL LAW**

**By**

**Guruuh Syahputra**

*The issue of the application of the death penalty for perpetrators of criminal acts of corruption resurfaced after the revelation of the corruption case carried out by the Minister of Social Affairs Juliari Batubara for the Covid-19 social assistance fund. Firli Bahuri as the Chair of the KPK, said he would sue the perpetrators of budget corruption in handling the corona virus (Covid-19) pandemic with the death penalty. As for the problems in this study, namely: How is the regulation of the death penalty in the perspective of criminal law in Indonesia? What are the requirements and qualifications for a corruption offense in a state with a COVID-19 emergency status that can be applied to a death penalty? What is the relevance of the application of capital punishment for perpetrators of corruption in a state of emergency status of covid-19?*

*This type of research is normative juridical research, while the nature of this research is descriptive analysis. This study uses several approaches, namely the legal and conceptual approach. The research data consists of primary and secondary data. The data analysis used in this research is qualitative data analysis.*

*In conclusion, the death penalty in the perspective of criminal law is not intended as retaliation, but to maintain a balance in society. The conditions for the application of capital punishment to perpetrators of criminal acts of corruption, namely the fulfillment of the provisions of Article 2 Paragraph (1), as well as elements in "certain circumstances" as explained in the explanation of Article 2 Paragraph (2) of the PPTK Law. The death penalty for perpetrators of corruption, especially for perpetrators of corruption during the COVID-19 pandemic, which is a non-natural national disaster, is quite appropriate and feasible to apply.*

*Suggestions, it is necessary to maintain the death penalty in the criminal system in Indonesia. It is necessary to revise Article 2 Paragraph (2) of the PPTK Law by setting clear and firm criteria for the application of the death penalty. It is necessary to apply the death penalty for perpetrators of corruption, especially for perpetrators of corruption during the COVID-19 pandemic which is a non-natural national disaster.*

**Keywords:** Death Penalty, Corruption Perpetrators, Perspective of the Criminal Procedure Code.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan, berupa kesihatan, sehingga penulisan tesis ini dapat dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penelitian tesis ini berjudul : Relevansi Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Negara Berstatus Darurat Covid-19 Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah masih jauh dari kesempurnaan, dalam kesempatan ini penulis membuka peluang kepada teman dan juga dosen (staf pengajar) untuk memberikan kritikan kepada penulis, sehingga pada penulisan karya ilmiah berikutnya penulis dapat menulis lebih baik lagi. Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dosen, teman, dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Marzuki, SH., M. Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.